

**HASIL RUMUSAN SIDANG KOMISI III
BIDANG LLASDP**

Ketua Sidang : **Ibrahim Basri**, *Kadishub Provinsi Kalimantan Barat*
Sekretaris : **Wiratno**, *Kasubdit Pelabuhan SDP*
Nara Sumber : **1. Ahmad Syukri**, *Direktur LLASDP*
 2. Widyatmoko, *Kasubdit Jaringan Transportasi SDP*
Notulen : **1. Tri Yuli Andaru P.**
 2. Fadli Arif
 3. Cucu Mulyana

I. PENDAHULUAN.

Sidang Komisi III Bidang LLASDP membahas tiga materi pokok yang meliputi;

1. Tata Hubungan Kerja dan Kelembagaan;
2. Perencanaan Pembangunan, Keperintisan dan Sistem Informasi, dan
3. Koordinasi dan pengawasan.

II. HASIL PERUMUSAN.

A. Materi Bahasan.

1. Tata Hubungan Kerja dan Kelembagaan
 - a. Pelaksanaan KM No. 4 Tahun 2003 tentang Tata Hubungan Kerja antara Dephub dengan Pemerintah Provinsi Bidang LLASDP
 - b. Serah terima pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan penyeberangan
 - c. Penyederhanaan peraturan KM.52/2004 tentang Pelabuhan Penyeberangan.
2. Perencanaan, Pembangunan, Keperintisan dan Sistem Informasi
 - a. Angkutan Penyeberangan Perintis
 - b. Perencanaan SDM di bidang pengelolaan pelabuhan SDP.

- c. Sistem Informasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - d. Pembangunan Bidang LLASDP
 - e. Kebutuhan kapal penyeberangan
3. Koordinasi dan Pengawasan
Sosialisasi KM 73 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau

B. Hasil Pembahasan.

1. Pelaksanaan KM No. 4 Tahun 2003 tentang Tata Hubungan Kerja antara Dephub dengan Pemerintah Provinsi Bidang LLASDP
- Tanggapan Komisi :
Memperhatikan hal-hal sebagai berikut;
- a. Hasil evaluasi dari pelaksanaan KM No. 4 Tahun 2003, terdapat hal-hal yang tidak bisa untuk dilaksanakan.
 - b. Telah direvisinya UU No. 22 tahun 1999 yang menjadi dasar dari penyusunan KM tersebut (UU No. 32 Tahun 2004), maka perlu dilakukan revisi terhadap KM No. 4 tahun 2003.
- Tindak Lanjut :
Dinas Perhubungan Provinsi dan Kab/Kota akan menyampaikan usulan bahan revisi terhadap Tata Hubungan Kerja dibidang LLASDP dalam KM No. 4 tahun 2003.
Hal yang sama perlu diusulkan juga untuk subsektor lainnya.
2. Serah terima pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan penyeberangan
- Tanggapan Komisi :
Terhadap Pelabuhan Penyeberangan yang telah selesai dibangun dan siap untuk dioperasikan, Pemerintah Kab/Kota yang mengusulkan harus menerima lebih dulu untuk pengelolaan dan operasional pelabuhan. Dalam hal Pemerintah Kab/Kota tidak sanggup untuk

mengelola/mengoperasikannya, perlu didiskusikan lebih lanjut dengan Pemerintah Provinsi.

Tindak Lanjut :

Pemerintah Kab/Kota dan/atau Provinsi, membuat pernyataan tertulis tentang kesanggupan mengelola dan pengoperasian pelabuhan penyeberangan dengan persetujuan DPRD setempat

3. Penyederhanaan peraturan KM.52/2004 tentang Pelabuhan Penyeberangan.

Tanggapan Komisi :

Komisi menyetujui penyederhanaan proses persetujuan dari penetapan lokasi sampai dengan pengoperasian pelabuhan penyeberangan pada KM.52/2004 yang semula 5 (lima) langkah menjadi 3 (tiga) langkah.

Tindak Lanjut :

Akan dilakukan revisi KM 52/2004 sesuai tanggapan dimaksud di atas.

4. Angkutan Penyeberangan Perintis

Tanggapan Komisi :

Sehubungan dengan Kenaikan harga BBM, komisi berpendapat bahwa perlu untuk melakukan evaluasi terhadap lintas angkutan perintis, dan pengurangan jumlah trip.

Dalam rangka mempercepat penyusunan kontrak keperintisan perlu dilakukan perubahan kontrak menjadi beberapa paket kontrak

Tindak Lanjut :

1. Pengurangan/ penghilangan lintas perintis yang sudah digantikan oleh moda lain
2. Pengurangan jumlah trip
3. Kontrak Perintis untuk lintas dalam propinsi disusun per propinsi
4. Kontrak Perintis untuk lintas antar provinsi disusun dengan PT. ASDP Pusat

5. Perencanaan SDM di bidang pengelolaan pelabuhan SDP

Tanggapan Komisi :

Dalam rangka mengatasi kekurangan SDM untuk mengelola pelabuhan penyeberangan, komisi berpendapat perlu dilakukan diklat dibidang : Manajemen Pelabuhan; Manajemen Operasional, Pelabuhan; dan Teknik Operasional Pelabuhan. Disamping itu diusulkan juga Diklat mengenai Pelabuhan penyeberangan yang diperuntukkan untuk Kepala Dinas Perhubungan.

Tindak Lanjut :

1. Dishub kab./kota dan propinsi mengajukan peserta diklat
2. Dit. LLASDP, Ditjen Hubdat bekerjasama dengan Balai Diklat LLASDP Palembang menyelenggarakan Diklat

6. Sistem Informasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Tanggapan Komisi :

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan data dan informasi mengenai penyelenggaraan angkutan sungai dan danau, perlu dilakukan penyusunan data base penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.

Tindak Lanjut :

1. Ditjen Hubdat : Menyiapkan Format Sistem Informasi
2. Dishub Propinsi dan Kab/Kota : Mengisi dan menyampaikan data ke Ditjen Hubdat secara berjenjang.

7. Pembangunan Bidang LLASDP

Tanggapan Komisi :

Memperhatikan tingkat kemajuan pelaksanaan kegiatan pembangunan dibidang LLASDP sampai dengan akhir September 2005, perlu dilakukan Monitoring dan Evaluasi. Disamping itu komisi juga setuju

dengan Program pengembangan transportasi SDP tahun 2006

Tindak Lanjut :

1. Melakukan percepatan pelaksanaan pembangunan.
2. Melakukan Addendum kontrak jika diperlukan.

8. Kebutuhan kapal penyeberangan

Tanggapan Komisi :

Mengingat masih terdapat 38 lintas penyeberangan yang belum beroperasi yang diantaranya disebabkan oleh belum tersedianya kapal penyeberangan, dan kebutuhan terhadap cadangan kapal angkutan penyeberangan perintis, serta belum dapat dipenuhinya permintaan kapal penyeberangan dari pemerintah propinsi dan Kabupaten/kota. Maka komisi setuju untuk dilakukan penyusunan kebutuhan kapal penyeberangan.

Dalam rangka mempercepat pemenuhan kebutuhan tersebut, jika perlu dapat dilakukan sharing pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (yang mampu) atau antara Pemerintah Daerah (yang mampu) dan Swasta.

Tindak Lanjut :

Ditjen Hubdat :

1. Melakukan Analisis dan Evaluasi usulan dari Provinsi
2. Mengusulkan pembangunan Kapal Penyeberangan

9. Sosialisasi KM 73 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau

Tanggapan Komisi :

Dengan telah diterbitkannya KM 73 tahun 2004, komisi setuju untuk dilakukan Sosialisasi KM 73 tahun 2004.

Tindak Lanjut :

1. Ditjen Hubdat : melakukan sosialisasi ke Dishub Propinsi
2. Dishub Propinsi : melakukan sosialisasi ke Dishub Kab/Kota

III. PENUTUP.

Demikian hasil Rumusan Sidang Komisi III Bidang LLASDP ini dibuat guna ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing

Jakarta, 24 Oktober 2005

KOMISI III (BIDANG LLASDP)

Ketua :
Ibrahim Basri

Sekretaris :
Wiratno

Komisi III Bidang LLASDP

Peserta :

1. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Kep. Riau
2. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Jambi
3. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Barat
4. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Timur
5. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan
6. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Tengah
7. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Nusa Tenggara Timur
8. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Maluku
9. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Maluku Utara
10. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Papua
11. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Irian Jaya Barat
12. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Samosir
13. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Toba Samosir
14. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis
15. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Indragiri Hilir
16. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kampar
17. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Siak
18. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Karimun
19. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kep. Riau
20. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Natuna
21. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Muaro Jambi
22. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tebo
23. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Timur
24. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat
25. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banyuasin
26. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Musi Rawas
27. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Muba
28. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ogan Ilir
29. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ogan Komering Ilir
30. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ogan Komering Ulu
31. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ogan Komering Ulu Utara
32. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bangka Barat
33. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bangka Selatan
34. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Belitung Timur
35. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bangkalan
36. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banyuwangi
37. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lamongan
38. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Jember
39. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Klungkung
40. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lombok Barat
41. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lombok Timur

42. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sumbawa
43. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Alor
44. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ende
45. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Flores Timur
46. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Manggarai Barat
47. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sikka
48. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sumba Timur
49. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bengkayang
50. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kapuas Hulu
51. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ketapang
52. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Melawi
53. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pontianak
54. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sambas
55. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sintang
56. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banjar
57. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Barito Kuala
58. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Hulu Sungai Baru
59. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Hulu Sungai Selatan
60. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjar Baru
61. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kota Baru
62. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan
63. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Barito Utara
64. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Gunung Mas
65. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kapuas
66. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kotawaringin Barat
67. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kotawaringin Timur
68. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Murung Raya
69. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau
70. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Berau
71. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bulungan
72. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tarakan
73. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kutai Kertanegara
74. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Malinau
75. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nunukan
76. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Penajam Paser Utara
77. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kep. Sangihe
78. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kep. Talaud
79. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banggai
80. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banggai Kep.
81. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Poso
82. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tojo Una-una
83. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Toli-Toli
84. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bantoeng
85. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bulukumba
86. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Mamuju
87. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Selayar

88. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sinjai
89. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Takalar
90. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Wajo
91. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Buton
92. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kolaka
93. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kolaka Utara
94. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bau-bau
95. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Muna
96. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Wakatobi
97. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Barat
98. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Selatan
99. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Timur
100. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Utara
101. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kep. Sula
102. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Buru
103. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kep. Aru
104. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Maluku Tenggara
105. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Maluku Tenggara Barat
106. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Timur
107. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Fak-fak
108. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sorong
109. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kaimana
110. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Manokwari
111. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Teluk Bintuni
112. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Teluk Wondama
113. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Asmat
114. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Biak Numfor
115. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Boven Digoel
116. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Mappi
117. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Merauke
118. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nabire
119. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Painai
120. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sarmi
121. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Yapen Waroppen
122. Pel. Penyeb. Gorontalo
123. Pel. Penyeb. Kalabahi
124. Pel. Penyeb. Kariangu
125. Pel. Penyeb. Palembang
126. PT. ASDP Dir. Usaha
127. PT ASDP Cab. Bakauheni
128. PT ASDP Cab. Ketapang
129. PT ASDP Cab. Lembar
130. PT ASDP Cab. Kayangan
131. PT ASDP Cab. Balikpapan
132. PT ASDP Cab. Bajoe
133. PT ASDP Cab. Kupang

- 134. PT ASDP Cab. Palembang
- 135. PT ASDP Cab. Luwuk
- 136. Ka. Balai ASDP Palembang
- 137. PT ASDP Cab. Merak
- 138. PT ASDP Cab. Surabaya